

## PRESS BRIEF

### Diskusi Publik

#### “Kelas Menengah Turun Kelas”

Jakarta, 9 September 2024 – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyelenggarakan diskusi publik yang mengupas fenomena penurunan kelas menengah. Tercatat selama 5 tahun terakhir, masyarakat kelas menengah mengalami penurunan sebesar 9,48 juta orang atau turun sebanyak 16,5% sejak tahun 2019. Penurunan jumlah kelas menengah yang diimbangi dengan meningkatnya jumlah penduduk kelas rentan dan calon kelas menengah, mengindikasikan bahwa kelas menengah mengalami “turun kelas”.

**Prof. Bustanul Arifin, Ekonom Senior INDEF**, menyoroti tentang berkurangnya jumlah kelas menengah memiliki dampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Kelas menengah memiliki peran penting dalam kinerja pembangunan ekonomi dimana kelas menengah memainkan peran sosial-politik yang penting, menentukan tata kelola, kualitas kebijakan, dan pertumbuhan ekonomi. “Dukungan kelas menengah terhadap reforma kebijakan ekonomi dan politik hanya dapat terwujud jika kebijakan sejalan dengan kepentingan mereka”, ungkap Prof. Bustanul. Dalam paparannya, Prof. Bustanul mengungkapkan bahwa kelas menengah yang aktif secara politik cenderung mendukung demokrasi, meskipun banyak tuntutan tentang kualitas pelaksanaan demokrasi itu.

Prof. Bustanul menyampaikan bahwa penurunan kelas menengah berhubungan dengan transformasi struktural perekonomian Indonesia. Transformasi struktural berupa pergeseran atau perpindahan dari ekonomi berbasis pertanian menjadi ekonomi berbasis industri manufaktur. Ekonom Senior INDEF ini menyampaikan bahwa penurunan kelas menengah sudah terjadi sejak tahun 1995 dan diperparah pada tahun 2020, “Cikal bakal deindustrialisasi sudah mulai terlihat sejak tahun 1995, yang mana pangsa terhadap PDB sebesar 41,8% menurun menjadi 38,5% di tahun 2005. Kemudian, angka tersebut terus menurun”. Prof. Bustanul juga menekankan bahwa secara keseluruhan tingkat inflasi terkontrol, tetapi *volatile food* masih tinggi.

Pemerintah memiliki pekerjaan yang belum selesai dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Prof. Bustanul menyarankan upaya penurunan kemiskinan dengan cara pemberian insentif dan perbaikan governansi kebijakan. Rekomendasi lain yang disarankan oleh Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung ini adalah perbaikan hulu dalam transformasi sistem pangan dan pertanian untuk memperkuat industrialisasi, “Industrialisasi terjadi, nilai tambah lebih kuat, lapangan kerja baru terbentuk, fondasi ekonomi kuat, sehingga kelas menengah lebih *agile* dan tangguh” katanya. Selain itu, strategi digitalisasi dengan pemanfaatan big data dan AI hingga penguatan ekonomi daerah dengan dukungan penelitian dan pengembangan, serta reforma sistem pendidikan dan pengembangan SDM dalam masyarakat akan mengatasi terjadinya penurunan kelas menengah.

**Yorga Permana, Dosen SBM ITB**, juga menyoroti fenomena penurunan kelas dari sisi ketenagakerjaan. Yorga beranggapan bahwa kerja layak merupakan faktor penting dalam

mencegah terjadinya penurunan kelas menengah. “Kerja layak mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan, melakukan mobilitas sosial, dan naik kelas ke kelas menengah”, ungkap Yorga. Namun, pemerintah belum banyak menyinggung persoalan kerja layak. Sektor informal di Indonesia masih mendominasi pasar tenaga kerja Indonesia dan tren *gig economy* mulai sejak tahun 2014. Penurunan kelas menengah terjadi ketika pekerja formal beralih menjadi pekerja informal karena tidak adanya kerja layak di sektor formal. Yorga memaparkan terjadinya deindustrialisasi prematur yang mana terjadi penurunan tenaga kerja sektor pertanian yang diimbangi dengan peningkatan tenaga kerja sektor jasa berketerampilan rendah. Yorga berpendapat, “alternatif lain selain manufaktur yang harus didorong oleh pemerintah adalah sektor jasa berketerampilan tinggi” ujar Yorga.

Rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Yorga untuk menciptakan kerja layak adalah kebijakan industri yang berfokus pada sektor mana yang memberikan *local multiplier* terbesar seperti sektor manufaktur atau *tradable services* (ekonomi digital, jasa perusahaan, keuangan). Kemudian, kebijakan kewirausahaan yang *well-targeted* dan fokus kepada *gazelle* di level menengah juga akan mendorong terciptanya kerja layak. Rekomendasi terakhir berupa kebijakan berbasis lokasi dengan cara optimalisasi kluster dan aglomerasi dalam peningkatan lapangan kerja secara regional.

**Eko Listiyanto, Direktur Pengembangan Big Data INDEF**, memaparkan Indeks Konsumen (IKON) *Indonesia Report* yang dilakukan oleh Continuum INDEF. Eko memaparkan bahwa terdapat indikasi pesimisme yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap perekonomian Indonesia dilihat dari media sosial. Perlambatan konsumsi dan PMI manufaktur yang semakin berkontraksi di Agustus 2024 menjadi alarm yang mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Selain itu, deflasi 4 bulan berturut-turut yang menurun mengindikasikan daya beli masyarakat melemah.

Eko juga menjelaskan mengenai indeks ekspektasi konsumen yang semakin menurun, “Ekspektasi penghasilan, ekspektasi ketersediaan lapangan kerja, dan ekspektasi kegiatan usaha yang konsisten menurun mengindikasikan ada sesuatu yang salah” tuturnya. Dalam pemaparannya, Eko melihat adanya sentimen negatif terhadap perkembangan harga. Warganet juga memiliki pandangan negatif terhadap potensi penghasilan mereka. Pengangguran dan sulitnya mencari kerja juga membuat sentimen ketenagakerjaan terus rendah.

Eko merekomendasikan pemerintah untuk menunda kenaikan harga-harga barang dan jasa yang bisa dikendalikan pemerintah (*administered price*). Selain itu, Eko juga merekomendasikan peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk menstimulasi kegiatan ekonomi. Industri padat karya juga harus dilindungi agar fenomena penurunan kelas menengah bisa teratasi. “Tren suku bunga tinggi harus segera diakhiri untuk menggerakkan sektor riil dengan cara membanjiri likuiditas kredit bagi UMKM atau dunia usaha”, ungkap Eko.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Eko Listiyanto / +62 813-3449-1660